



Article

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG LAKTASI DALAM MENDUKUNG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF BAGI IBU PEKERJA**

*Rahayu Mujiharti*

*Fakultas Keperawatan, Institut Kesehatan Rajawali Bandung*

SUBMISSION TRACK

Received: December 08, 2022  
Final Revision: December 17, 2022  
Available Online: December 22, 2022

KEYWORDS

*Exclusive breastfeeding, Policy Implementation, Lactation Room.*

CORRESPONDENCE

Rahayu Mujiharti  
Email: rahayu.1960@gmail.com

**A B S T R A C T**

One factor that results in the low exclusive breastfeeding is the status of the working mother. The function of exclusive breastfeeding can prevent babies from developing diseases, help the baby's brain and physical development and can reduce infant mortality. The impact of babies who are not exclusively breastfed is an increase in medical costs, In supporting the program of exclusive breastfeeding in the workplace, the government has made policies in the form of laws, government regulations and joint regulations of 3 ministers regarding increasing exclusive breastfeeding during working hours at work and PERMENKES No.15 of 2013 regarding the provision of lactation space many workplaces have not implemented these policies. The policy of providing lactation space is a demand for workplaces both in government agencies and private companies to implement this policy and make the workplace friendly in terms of breast feeding. The main objective of this research is to conduct a literature study on the implementation of policies on providing lactation space in support of exclusive breastfeeding for workers. This research method uses a literature review. This study includes literature published from 2006 to 2019 and listed on DOAJ, Garuda, and PubMed-NCBI. The results of the implementation of the breast feeding room policy in supporting the provision of exclusive breast milk (ASI) for workers show that there are differences where, there are policies that have implemented policies but have not been optimal.

## I. INTRODUCTION

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan adalah hasil kesepakatan 194 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) guna mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat di tahun 2030. Salah satu tujuan dan indikator SDGs adalah memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua kalangan usia diantaranya yaitu, pada tahun 2030 kematian dapat dicegah dari bayi yang baru lahir dan balita (Palutturi, 2015). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian derajat kesehatan, menurut World Health Organization (WHO) 2017 angka kematian balita mencapai 5,6 juta pertahunnya yaitu 15.000 anak meninggal setiap harinya dengan persentase 46% kematian berada pada periode neonatal. Merujuk pada data tersebut maka diperlukan upaya-upaya pencegahan kasus yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi, khususnya angka kematian neonatal.

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 tentang proyeksi angka kematian neonatal bayi dan balita di dapatkan angka kematian neonatal di Indonesia yaitu 15 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini berarti satu dari 67 anak meninggal dalam bulan pertama kehidupannya. Sedangkan angka kematian bayi pada periode yang sama adalah 24 kematian berarti 1 dari 24 anak meninggal sebelum ulang tahun pertamanya. Dari seluruh kematian tersebut 63% kematian terjadi pada bayi dalam satu bulan setelah lahir. United Nations Children Fund (UNICEF) mengemukakan bahwa, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh neonatal yaitu dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

Menurut World Health Organization (WHO, 2017) ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa memberikan makanan maupun minuman apapun kepada bayi dari sejak lahir hingga usia bayi 6 bulan. United Nations Children Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa pemberian ASI Eksklusif dapat menekan angka kematian bayi yaitu dengan

mengurangi 30.000 kematian bayi di Indonesia dan menurunkan 10 juta kematian bayi di dunia dengan memberikan ASI sejak pertama kelahiran selama 6 bulan tanpa memberikan makanan dan minuman tambahan pada bayi. Bayi yang diberikan ASI secara Eksklusif dapat mencegah bayi dari terserang penyakit, serta membantu perkembangan otak dan fisik bayi (Sudargo, 2018).

Untuk mencapai target SDGs maka diperlukan adanya program kesehatan anak yang mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan balita. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak pemberian ASI Eksklusif di Indonesia yaitu dengan upaya pemerintah membuat kebijakan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 129 yaitu "pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif" ketentuan lebih lanjut juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI secara Eksklusif pada bayi selama 6 bulan.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, target bayi yang mendapat ASI Eksklusif yaitu sebesar 80%. Data yang diperoleh dari pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018 proporsi pola pemberian ASI Eksklusif di Indonesia pada bayi usia 0-5 bulan hanya sebanyak 37,3% hal ini menunjukkan bahwa pemberian ASI Eksklusif di Indonesia masih jauh dari target Nasional. Untuk meningkatkan cakupan ASI Eksklusif di Indonesia, pemerintah mewajibkan pemerintah pusat, daerah, pengurus tempat kerja, dan penyelenggara tempat umum untuk mendukung ibu dalam menyusui agar dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya sampai bayi berusia 6 bulan. (PP No.33 tahun 2012),

Faktor yang mengakibatkan

masih rendahnya pemberian ASI Eksklusif di Indonesia salah satunya yaitu status ibu yang bekerja (Kemenkes RI, 2012). Hal ini di dukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahlan dkk (2013) bahwa sebagian besar ibu yang berstatus pekerja tidak memberikan ASI secara Eksklusif kepada bayinya, bekerja diluar rumah mengindikasikan pendeknya waktu yang di alokasikan untuk menyusui tenaga kerja atau penuh waktu berpengaruh secara signifikan terhadap rendahnya tingkat inisiasi menyusui.

Tempat kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Pasal 31 tempat kerja yaitu terdiri atas perusahaan dan perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta. Menurut organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilan menyusui pada ibu pekerja adalah pendeknya waktu cuti kerja, kurangnya dukungan tempat kerja, pendeknya waktu istirahat saat bekerja, kurangnya waktu untuk memerah ASI, dan tidak adanya fasilitas ruangan untuk memerah ASI.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase wanita pekerja usia produktif di Indonesia pada tahun 2013 dari 47,91% menjadi 53,40% di tahun 2014 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan pekerja wanita menjadi 54%. Pemenuhan pemberian ASI eksklusif merupakan hak bagi setiap bayi dan ibunya termasuk ibu pekerja namun, ibu bekerja masih dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif. (Sudargo, 2018). Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada wanita/ibu pekerja dalam memberikan ASI dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI secara Eksklusif di landasi dengan undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 200 bahwa bagi setiap orang yang sengaja menghalangi program pemberian ASI Eksklusif dipidana paling lama 1 tahun dan denda

sebanyak Rp 100.000.000 kemudian pada pasal 201 untuk perusahaan denda menjadi maksimal tiga kali lipat atau Rp 300.000.000 dan ancaman pencabutan badan izin usaha.

Dari hasil penelitian sebelumnya, pemenuhan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi masih rendah hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahadian (2014) yang menyatakan bahwa pemenuhan Hak ASI Eksklusif di kalangan ibu pekerja masih jauh dari yang diharapkan dan fasilitas ruang menyusui yang diberikan perusahaan terbatas sehingga pada akhirnya tidak berfungsi selayaknya ruang menyusui, bahkan harus ada ibu yang memerah ASI nya di toilet. Hal inipun diperkuat dengan penelitian Chow Tan et al (2011) bahwa masih adanya hambatan dari atasan/fasilitator yang tidak mendukung pemberian ASI di tingkat organisasi sehingga tidak tersedianya ruang laktasi bagi pekerja.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (2018) terhadap 19 Provinsi dan 78 Kabupaten atau Kota didapatkan bahwa baru sekitar 64,8% gedung perkantoran/perusahaan di Indonesia yang telah menyediakan ruang laktasi/ruang menyusui. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 35,2% gedung perkantoran/perusahaan di Indonesia belum menyediakan ruang laktasi dalam rangka mendukung pemberian ASI Eksklusif bagi pekerja wanita. Ketersediaan ruang laktasi, menjadi persoalan tidak hanya di perusahaan swasta namun juga di instansi pemerintah (Rika Kumala dkk, 2019). Meskipun telah dikeluarkan peraturan tentang diharuskannya setiap tempat kerja untuk menyediakan fasilitas ruangan khusus untuk ibu menyusui, kenyataan dilapangan belum semua tempat kerja baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah yang menyediakan ruangan khusus untuk menyusui atau memerah ASI dan masih ada yang menyediakan ruang laktasi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No.15 Tahun 2013 tentang tatacara penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui pasal 7 yaitu dalam menyediakan ruang ASI, pengurus

tempat kerja dan penyelenggara sarana umum harus memperhatikan unsur-unsur perencanaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, dan pendanaan.

Pada pasal 9 (1) menyatakan bahwa ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen minimal 3x4m<sup>2</sup> dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja yang dilengkapi persyaratan kesehatan ruang ASI sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 (2). Ruang Laktasi harus dilengkapi dengan peralatan dengan sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan menyimpan ASI antara lain adalah lemari pendingin untuk menyimpan ASI, kulkas dengan suhu dingin dan stabil, space cukup untuk digunakan bersama, gel pendingin, tas untuk membawa ASI perahan dan strelizer botol ASI. Standar ruang ASI adalah sekurang-kurangnya terdapat kursi, meja, westafel dan sabun cuci tangan.

Menurut penelitian Inova (2019) didapatkan bahwa implementasi kebijakan ruang menyusui belum terlaksana dengan baik, masih banyak pelaksana kebijakan yang tidak menerima informasi tentang penyediaan ruang menyusui di tempat kerja, tidak ada dana dan tenaga konselor ASI, fasilitas ruang menyusui belum memadai, dan tidak adanya tim khusus pembinaan dan pengawasan penyediaan ruang menyusui. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) didapatkan hasil penelitian bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan ruang laktasi di tempat kerja dalam aspek sumber daya dari segi pendanaan sudah baik, dan telah adanya peraturan internal perusahaan namun dari segi sumberdaya manusia belum terlaksana sesuai standar ruang laktasi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Implementasi kebijakan pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu dilakukan kajian terhadap faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan

ruang laktasi bagi pekerja, serta membandingkannya dengan standar ruang laktasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No.15 Tahun 2013 tentang tatacara penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui. Hal ini diharapkan dapat mempunyai daya ungkit terhadap peningkatan mutu ruang laktasi di tempat kerja dan berdampak pada peningkatan pemberian ASI Eksklusif bagi para pekerja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan studi litelatur tentang "Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Dalam Mendukung Pemberian ASI Eksklusif Bagi Pekerja"

## II. METHOD

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (Library Research) atau literature review. Jenis litelatur review yang digunakan dalam penelitian ini adalah related research dengan metode Traditional Review, menurut Siswanto (2010) metode traditional review merupakan salah satu metode dalam penyusunan karya ilmiah yang direview dengan cara pengumpulan faktanya dan teknik sintetisnya tidak mengikuti cara baku sebagaimana systematic review.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, melainkan data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Ruang Lakatasi Dalam Mendukung Pemberian ASI Eksklusif Bagi Pekerja.

Data penelitian ini adalah seluruh jurnal yang didapatkan dari jurnal nasional maupun internasional yang berisikan tentang konsep yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui web (internet), untuk mendapatkan artikel mengenai Implementasi Kebijakan Ruang Lakatasi Dalam Mendukung Pemberian ASI Eksklusif Bagi Pekerja. Pencarian dilakukan

dengan menggunakan Google Scholar, Directory Open Acces Journal (DOAJ), Garba Rujukan Digital (Garuda), dan NCBI yang menunjang penyusunan tugas akhir.

Penelusuran menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia untuk mendapatkan artikel Nasional dan Bahasa Inggris untuk mendapatkan artikel Internasional. Penelusuran jurnal nasional menggunakan bahasa Indonesia dengan kata kunci: "Implementasi Kebijakan, ibu pekerja, dan ruang menyusui/laktasi". Sedangkan untuk jurnal internasional menggunakan Bahasa Inggris dengan kata kunci: "*Workplace eksklusif breastfeeding, lactation accommodation, policy employe support breastfeeding*".

### III. HASIL

#### a. Jumlah dan Sumber Artikel yang Termasuk Kriteria Inklusi

Hasil menunjukkan terdapat 18 artikel yang ditemukan pada jurnal nasional. Pada jurnal internasional terdapat 235 artikel. Langkah selanjutnya adalah peninjauan abstrak. Setelah meninjau abstrak dari 31 artikel yang dipilih, 56 jurnal dikeluarkan karena bukan berupa teks lengkap, dan 31 artikel dimasukkan untuk langkah berikutnya yang merupakan tinjauan full teks. Pencarian untuk full teks dari 150 artikel yang didapat, terdapat 143 artikel jurnal yang dikeluarkan karena tidak termasuk dalam kriteria inklusi. Sebanyak 7 artikel yang dipilih dimasukkan untuk dianalisis. Hasil seleksi artikel studi dapat digambarkan dalam diagram flow dibawah ini, yang merupakan alur pemilihan artikel jurnal. Berdasarkan hasil penelitian artikel jurnal ditetapkan 7 jurnal yang membahas mengenai implementasi kebijakan ruang laktasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan kriteria inklusi seperti tertera pada tabel sebagai berikut

1. Penulis: Rini, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan  
Judul: Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi di Kota Malang  
Tahun: 2018  
Kota: Malang  
Nama Jurnal: Aceh Nutrition Journal

(AcTion)

Volume: Vol.3 No.1

ISSN: 2527-3310

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif tehnik pengambilan sampling informan yaitu dengan purposive sampling. Implementasi kebijakan ruang laktasi di Kota Malang menunjukkan bahwa penyediaan ruang laktasi setiap tahunnya bertambah meskipun beberapa belum memenuhi standar sesuai dengan kebijakan penyediaan ruang laktasi.

2. Penulis: Inova, Nurli

Judul: Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui di Kota Padang

Tahun: 2019

Kota: Padang

Nama Jurnal: Kesehatan Andalas

Volume: Vol.8 No.1

ISSN: 2301-7406

Metode dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif eksplotatif dengan tehnik wawancara mendalam dan observasi. Implementasi kebijakan ruang laktasi di Kota Padang menunjukkan fasilitas ruang menyusui di tempat kerja hanya ditemukan pada tiga instansi pemerintah dan satu instansi swasta dan seluruhnya belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan penyediaan ruang laktasi.

3. Penulis: Prawiti Sugeng Wijaya, Soesanto

Judul: Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Swasta

Tahun: 2017

Kota: Semarang

Nama Jurnal: Public Health Perspective Journal Volume: Vol.2 No.2

ISSN: 2528-5998

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus Implementasi kebijakan ruang laktasi di PT. Royal Korindah sudah cukup baik dalam mendukung dan menghidupkan ruang laktasi. Berbeda dengan pelaksanaan kebijakan ruang laktasi di KPP Pratama dimana masih kurang baik dalam

mendukung kebijakan ruang laktasi

4. Penulis: Nela Kusuma Sari, Galuh Nita Prameswari

Judul: Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Tempat Kerja Tahun: 2019

Kota: Semarang Nama Jurnal: Higeia Volume: Vol.2 No.1 ISSN: 1475-362846 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, tehnik pengambilan informan dengan purposive sampling dan pengambilan data dengan wawancara mendalam serta observasi. Implementasi kebijakan ruang laktasi di PT. Bina Guna Kimia Sumber daya fasilitas mencakup sarana dan prasarana ruang laktasi tersedia dan peralatan yang tersedia sudah memenuhi standar ruang laktasi yang tercantum dalam PERMENKES No.15 Tahun 2013, namun belum memiliki tenaga terlatih konselor ASI meskipun penanggung jawab ruangan berlatar belakang kesehatan/tenaga medis.

5. Penulis: Agnes Melissa, Sutopo Patria Jati

Judul: Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Bagi Para Pekerja di PT Apac Corpora Kabupaten Semarang Tahun: 2015

Kota: Semarang

Nama Jurnal: Kesehatan Masyarakat

Volume: Vol.3 No.2

ISSN: 2356-3346

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan wawancara serta observasi mendalam untuk metode pengumpulan data. Implementasi kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Bagi Para Pekerja di PT Apac Corpora Kabupaten Semarang terhambat dikarenakan ruang laktasi belum memiliki staf yang berperan sebagai konselor ASI (tidak adanya tenaga terlatih), dari segi pendanaan tidak tersedia dana yang cukup. Serta tidak terdapatnya peraturan internal dalam hal mendukung pemberian ASI Eksklusif dan tidak terdapat SOP dalam implementasi kebijakan.

6. Penulis: Tan Chow,MS,RD, Ingrid Smithy Fulmer, PhD, Beth H. Olson,PhD

Judul: Perspectives of Managers Toward Workplace Breastfeeding

Support in The State of Michigan

Tahun: 2011

Kota: Michigan

Nama Jurnal: Jurnal of Human Lactation

Volume: Vol.27 No.2

DOI:10.1177/089033441039190

Rancangan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menilai perilaku organisasi dengan cara survei.

Tidak terdapatnya ruangan khusus untuk memompa ASI bagi pekerja, dikarenakan minimnya dukungan pemberian ASI dari atasan di tempat kerja.

7. Penulis: Joanna Kosmala-Anderson, Louise M.Wallace

Judul: Breastfeeding Works: The role of empolyers in supporting women who wish to breastfeeding and work in four organizations in England

Tahun: 2006

Kota: England

Nama Jurnal: Jurnal of Public Helath Volume: Vol.28 No.3

DOI: 10.1093/pubmed/fdl012

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan membuat kuisisioner secara anonin yang dilaksanakan di empat organisasi sektor publik besar mengenai dukungan menyusui di tempat kerja Hampir 80% wanita ingin terus menyusui setelah kembali bekerja. Namun, 90% dari semua responden tidak mengetahui adanya informasi kebijakan di tempat kerja mengenai dukungan menyusui setelah kembali bekerja. Hampir 90% responden menyatakan bahwa pengusaha harus berbuat lebih banyak untuk mendukung pemberian ASI.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil dari 7 jurnal yang di rivew terdapat penekanan masalah yang diangkat untuk penelitian dan setiap artikel menggunakan metode penelitian dan analisis yang berbeda-beda.

#### IV. PEMBAHASAN

1. Penekanan masalah yang diangkat untuk penelitian

Pada penelitian Rini (2018) dan Inova (2019) memiliki masalah yang sama

dan diangkat sebagai point penting dalam penelitiannya yaitu pelaksanaan kebijakan ruang laktasi yang terdapat di kota masing-masing serta bagaimana kebijakan tersebut belum terlaksana dengan menekankan kepada empat variabel penelitian sesuai dengan teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi/kecenderungan sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi. Pada penelitian Wijaya (2019) mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan ruang laktasi dengan menganalisis kebijakan ruang laktasi di tempat kerja dua instansi sekaligus yaitu instansi pemerintah dengan instansi swasta kemudian menekankan pada faktor yang menjadi pemicu terhambatnya pelaksanaan kebijakan di instansi tersebut menggunakan teori Van Meter Van Horn dengan mengacu pada enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi, dan lingkungan sosial ekonomi. Sari (2019) menekankan pada aspek sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya fasilitas berupa sarana dan prasarana, serta sumber daya keuangan bagaimana aspek sumber daya dapat menjadi salah satu pemicu efektif atau tidaknya suatu kebijakan ruang laktasi di tempat kerja. Melissa (2015) memberikan penekanan untuk mendukung hal tersebut dengan melakukan penelitian yang menekankan bagaimana kebijakan pemberian ASI Eksklusif menjadi suatu kesatuan dalam pelaksanaan kebijakan ruang laktasi dimulai dari peraturan internal berupa waktu istirahat untuk menyusui, tatacara penggunaan ruang laktasi dan fasilitas sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat kebijakan ruang laktasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja. Selain aspek sumber daya maka penelitian Tan Chow (2011) mengidentifikasi hambatan dari fasilitator tidak adanya dukungan

implementor untuk menyusui di tempat kerja dan tidak adanya peraturan internal di dalam perusahaan. Joana Anderson (2012) memberikan penekanan bahwa hambatan dukungan menyusui di tempat kerja, yaitu terkait komunikasi yang kurang baik dari atasan meskipun kebijakan dukungan pemberian ASI seperti ruang laktasi telah ditetapkan

## 2. Langkah penelitian atau metode penelitian yang digunakan

Pada penelitian Rini (2018), Inova (2019), Sari (2019) dan Melissa (2015) alat pengumpulan data menggunakan desain penelitian yang sama yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Rini dan Inova menggunakan tehnik wawancara mendalam dan observasi secara langsung yang nantinya akan di analisis sehingga dapat mengetahui lebih jelas pelaksanaan kebijakan ruang laktasi. Wijaya (2019) menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Untuk melakukan penelitian Tan Chow (2011) menggunakan desain penelitian kualitatif dan menggunakan tehnik diskusi kelompok. Joanna Kosmala-Anderson (2006) menggunakan desain penelitian kuantitatif yaitu melakukan kuisisioner secara anonim yang dilaksanakan di empat organisasi sektor publik besar mengenai dukungan menyusui di tempat kerja.

## V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian literatur review mengenai implementasi kebijakan ruang menyusui dalam mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi pekerja menunjukkan adanya perbedaan dimana, pelaksanaan kebijakan terdapat tempat kerja yang telah menjalankan kebijakan namun belum optimal, dan ada pula yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan maka dapat disimpulkan:

1. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan ruang laktasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif bagi ibu pekerja yang paling banyak di temukan di setiap artikel adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tertera dalam PERMENKES No. 15 Tahun 2013 tentang tatacara penyediaan ruang laktasi. Adanya hambatan komunikasi karena sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Hambatan disposisi atau respon implementor yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan ruang laktasi. Struktur birokrasi belum adanya kejelasan dari pemerintah mengenai Standar Operational Prosedur (SOP) terkait implementasi kebijakan ruang laktasi di tempat kerja dan tidak adanya monitoring dan evaluasi kebijakan serta belum adanya sanksi yang tegas terhadap tempat kerja instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta yang belum memiliki ruang laktasi.
2. Dapat disimpulkan tempat kerja instansi pemerintah maupun swasta/ perusahaan belum sepenuhnya mendukung pemberian ASI Eksklusif bagi pekerja. Pelaksanaan kebijakan ruang laktasi juga belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya komunikasi dan koordinasi yang belum optimal antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sumber daya manusia, dana, dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya dukungan implementor serta tidak adanya monitoring evaluasi sehingga belum dapat mencapai target dan tujuan penyediaan ruang laktasi.

## REFERENSI

- Ayuningtyas, Dumilah. (2014). Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anderson Joanna Kosmala, Louise M.Wallace. (2010). Breastfeeding Works: The role of empolyers in supporting women who wish to breastfeeding and work in four organizations in England. Vol 28(3). Doi: 10.1093/pubmed/fdl012 Available at: <http://academic.oup.com/jpubhealth/article/Diakses> Pada April 2020.
- Ayu, Ida. (2017). Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif. Jakarta : AR-Ruzz Media.
- Badan Pusat Statistic (2019). Persentase wanita pekerja di Indonesia. Available at: <http://www.bps.go.id/publication/2019/05/31/keadaan-pekerja-di-indonesia-februari-2019.htm/> Diakses Pada April 2020.
- Dahlan , Arvina dkk (2013). Hubungan Status Pekerjaan Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Available at: <http://www.jurnal.unimus.ac.id/> Diakses pada April 2020.
- Dunn,William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Encyclopedia of Children Health. Definition working mothers. Available at: <http://www.healthofchildren.com/> Diakses Pada April 2020.
- Ikatan Dokter Indonesia. Sukses menyusui saat bekerja. Available at: <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/sukses-menyusui-saat-bekerja/> Diakses Pada April 2020.
- Inova (2019). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui di Kota Padang. Jurnal Kesehatan Andalas. 8(1). p-ISSN 2301-7406 e-ISSN 261 1138. Available at: <http://www.fk.unand.ac.id/> Diakses Pada April 2020.
- Kementerian Kesehatan (2012). Rendahnya pemberian ASI Eksklusif di Indonesia. Available at: <http://www.kesmas.kemkes.go.id/portal/konten/070910-sosialisasi-percontohan-asi-ditempat-kerja/> Diakses Pada April 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi Ruang Laktasi. Available at: <http://www.kbbi.web.id/>. Diakses Pada April 2020.
- Lingkungan Kerja Ramah Laktasi. (2018). Pedoman Untuk Perusahaan. Available at: <http://aimi-asi.org/> Diakses Pada April 2020
- Melissa Agnes. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Bagi Pekerja di PT Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 3(2). ISSN: 2356-3346. Available at: <http://www.eprintis.undip.ac.id/4590/1/5202/pdf/> Diakses Pada April 2020
- Nugroho, Riant. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputido. (2007). Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputido.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Available at: <http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/sties/default/files/> Diakses Pada April 2020

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor.27/MEN/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Available at: <http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/sties/default/files/> Diakses Pada April 2020
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor.48/MEN/PP/XXII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Available at: <http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/sties/default/files/> Diakses Pada April 2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Tatacara penyediaan fasilitas khusus menyusui.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018 Available at: <http://kemenkes.go.id/folder/view/01/structure-publikasi-data-pusat-data-dan-informasi>. Diakses Pada April 2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Available at: <http://persi.or.id/pmk7412008/pdf/> Diakses Pada April 2020
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI secara Eksklusif. Available at: <http://jdih.kemnkeu.go.id/fullText/2012/33TAHUN2012PP.HTM/>. Diakses Pada April 2020
- Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Available at: <http://peraturan.bpk.go.id/>. Diakses Pada April 2020.
- Palutturi, Sukri (2015) Health Politics : Teori dan Praktek. Makasar. Rika Kumala et al. (2019). Semeru Research Institute. Available at: <http://www.theconversation.com/amp/pemberian-asi-eksklusif/> Diakses Pada April 2020.
- Rahardian, Angga. (2017). Pemenuhan Hak ASI Eksklusif Di Kalangan Ibu Bekerja Peluang dan Tantangan. Jurnal Kependudukan Indonesia. 9(2). p- ISSN 2528-5998 e-ISSN 2540-7945 Available at: <http://www.ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/> Diakses Pada April 2020.
- Roesli, Utami. (2008). Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif. Jakarta: Pustaka Bunda.
- Sari, Nela Kusuma, and Galuh Nita Prameswari. Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Tempat Kerja (2019). Jurnal Higea. 2(1). p-ISSN 1475-362846.
- Siswanto (2010) Systematic Riview Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-hasil Penelitian (Sebuah Pengantar). Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 13(4). Available at: <http://www.media.neliti.com/> Diakses Pada April 2020.
- Suirakoa I Putu, Ni Nyoman Budiani. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Kesehatan. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Panasea.
- Taylor Dena. (2013). The Litelature Review: A Few Tips On Conducting It. Available at: <http://www/> Diakses pada April 2020.
- Tan Chow et.al. (2011). Perpectives of managers toward workplace breastfeeding support in the state of Michigan. Jurnal Of Human Lactation. Vol 27(2). Doi: 10.1117/0890334410391908 Available at: <http://www.journals.sagepub.com/> Diakses Pada April 2020
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Available at: [http://www.hukum.unsrat.ac.id/uu99\\_tahun1999/](http://www.hukum.unsrat.ac.id/uu99_tahun1999/) Diakses Pada April 2020
- UNICHEF (2013). ASI adalah penyelamat hidup paling murah dan efektif di Dunia. Jakarta: UNICHEF. Availabel at : [http://www.unichef.org/indonesia/id/media\\_21270.html](http://www.unichef.org/indonesia/id/media_21270.html).

- Diakses Pada April 2020 (2019). Breastfeeding. Availabel at: [http://www.unichef.org/nutrition/index\\_24824.html/](http://www.unichef.org/nutrition/index_24824.html/) Diakses pada April 2020.
- World Health Organization (2017). Child Health Available at : [http://www.who.int/gho/child\\_health/en/](http://www.who.int/gho/child_health/en/) Diakses pada April 2020.
- WHO (2017). The World Health Organizations Infant Feeding Recommendation. Availabel at: [http://www.who.int/nutritions/topics/infantfeeding\\_recommendation/](http://www.who.int/nutritions/topics/infantfeeding_recommendation/) Diakses Pada April 2020
- Winarno, Budi (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, Studikasuk. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Wijaya, Prawiti S, Soesanto. (2017). Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Suwasta. 2 (2) . ISSN 2528-5998 e-ISSN 2540-7945. Available at: <http://www.unnes.ac.id/sju/rinder.php/phpj/>. Diakses Pada April 2020.